

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN MATA UANG INDONESIA TAHUN 1945-1953**

Berbagai peristiwa penting terjadi sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus yang melemahkan Jepang, disusul dengan pembentukan PPKI pada 7 Agustus sebagai langkah menuju kemerdekaan. Bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus, memaksa Jepang menyerah. Situasi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.<sup>48</sup> Meskipun telah merdeka, perjuangan RI belum berakhir. Proklamasi justru menjadi awal perjuangan mempertahankan kedaulatannya sebagai negara merdeka, termasuk di bidang ekonomi lewat kepemilikan bank sentral dan mata uang sendiri.

Negara merdeka tak cukup hanya dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat. Negara bisa menjadi tegak setelah punya mata uang. Pada masa awal berdirinya RI, peredaran uang invasi Jepang belum bisa dikendalikan. Salah satu sebabnya adalah karena negara RI pada saat itu belum mempunyai mata uang yang dapat menggantikan mata uang invasi Jepang atau mata uang Hindia Belanda dan De Javasche Bank yang masih ada dalam peredaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang invasi Jepang tidak berlaku lagi di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan mata uang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi. Berikut ini adalah mata uang yang pernah beredar di Indonesia pada tahun 1945-1953.

---

<sup>48</sup> Endang Witanti, *Proklamasi Kemerdekaan* Yogyakarta: Istana Media, 2017, hlm. 19-20.

### 3.1 Oeang Republik Indonesia (ORI)

Usulan untuk menerbitkan mata uang sendiri sudah muncul dari masyarakat, termasuk dari Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara yang pertama kali mengusulkannya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Namun, karena keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga ahli, usulan tersebut sempat ditunda.<sup>49</sup> NICA membawa mata uang gulden saat kembali ke Indonesia, yang telah disiapkan sejak 1942 di London. Uang ini terdiri dari sembilan pecahan yaitu, 50 sen, 1, 2 ½, 5, 10, 25, 50, dan 100 gulden. Dicitak oleh American Bank Note Company. Uang ini kemudian dikenal dengan “Uang NICA”. Selain itu, karena kebanyakan uang NICA yang beredar ini pecahan 50 sen yang dicetak dengan warna merah, maka uang ini juga terkenal dengan sebutan “Uang Merah”.<sup>50</sup>

Menghadapi tindakan NICA, pemerintah RI mengeluarkan maklumat melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**OEANG NICA TIDAK BERLAKOE.  
Makloemat Pemerintah Republik Indonesia**

Oleh pihak NICA telah disebarkan oeang kertas “Nederlandsch-Indie” jang baroe oempamanja oeang kertas f 0,50 jang berwarna merah sebelah dan hidjau sebelah. Oeang ini kita anggap tidak lakoe; djanganlah diterima, soepaja djangan timboel inflasi disini.

Pemerintah Republik Indonesia  
Djakarta, 2 Oktober 1945<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*. 1955. Jakarta: LP3ES, hlm. 55.

<sup>50</sup> Erwin Kusuma, dkk, *Uang Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. 2021. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 117.

<sup>51</sup> Pemerintah RI Jogjakarta: *Maklumat tgl. 2 Oktober 1945 tentang tidak berlakunya uang Nica*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pada 3 Oktober 1945 melalui Radio Republik Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Presiden RI No. 1/10 adalah empat macam mata uang, yaitu uang kertas De Javasche Bank, uang kertas Pemerintah Hindia Belanda, uang kertas pemerintah Balatentara Dai Nippon, uang logam Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942.<sup>52</sup> Berkaitan dengan maklumat tersebut, Pemerintah menjelaskan bahwa ORI dan penetapan kursnya masih dipersiapkan. Sementara itu, masyarakat terus diimbau mematuhi maklumat dan menolak penggunaan uang NICA guna mencegah inflasi.

Mr. A. A. Maramis, selaku Menteri Keuangan dalam kabinet pertama, telah mengambil langkah-langkah pencetakan uang Republik Indonesia sejak awal menjabat posisi tersebut untuk menutup kekurangan anggaran dan mengendalikan peredaran uang, mata uang Republik juga menjadi bukti kedaulatan Pemerintah RI di mata rakyat dan dunia internasional.<sup>53</sup> Melalui pertemuan di Kementerian Keuangan, membentuk tim yang terdiri dari anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta dan wakil buruh dari Surabaya untuk meninjau beberapa kota guna menentukan percetakan yang layak mencetak uang Republik.

Pada tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan membentuk suatu panitia yang dinamakan “Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia”, yang diketuai oleh T.R.B Sabaruddin. Tugas tim ini adalah mengurus pencetakan uang, dibantu oleh 16 pegawai berpengalaman dari

---

<sup>52</sup> Pemerintah RI: *Maklumat No. 1/10 tgl. 3 Oktober 1945 tentang macam-macam uang sebagai alat pembayaran di daera Jawa*. Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1945-1949, No. 408.

<sup>53</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 127.

percetakan G. Kolff & Co. Selain itu, dibentuk panitia yang dipimpin Enang Kusnadi untuk mengatur penerimaan, penyimpanan, dan peredaran uang baru.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tim, proses pengerjaan pencetakan uang republik mula-mula dilakukan di Surabaya dikarenakan kota ini memiliki fasilitas percetakan yang memadai, salah satunya adalah percetakan G. Kolff & Co., yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, wilayah Surabaya juga masih relatif aman dan berada di bawah kendali pemerintah Republik Indonesia, sebelum terjadinya pertempuran besar pada 10 November 1945. Letak geografis Surabaya yang strategis sebagai kota pelabuhan dan pusat distribusi di Jawa Timur turut memudahkan proses logistik, pengamanan, dan penyebaran uang yang dicetak.

Menurut rencana, uang baru itu akan dikeluarkan pada bulan Januari 1946. Tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa hari kemudian pecahlah pertempuran dahsyat yang kemudian dikenal dengan sebutan “Hari Pahlawan” pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya, pekerjaan pencetakan uang harus diteruskan di ibu kota negara, Jakarta.<sup>55</sup>

Aos Surjatna dan timnya berhasil menyelesaikan sebagian tugas pencetakan uang.<sup>56</sup> Desain dibuat di Balai Pustaka, dan klise pertama kali dibuat oleh Bunyamin Soerjohardjo pada 17 Oktober 1945. Uang pertama yang dicetak adalah pecahan 100 rupiah di percetakan Salemba, Jakarta. Namun, karena situasi Jakarta

---

<sup>54</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, 2003. *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)*. Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, hlm. 1.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>56</sup> Aos Surjatna merupakan anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta yang diangkat sebagai salah satu anggota panitia penyelenggara pencetakan Uang Republik Indonesia.

memburuk akibat agresi militer Sekutu dan NICA, pencetakan dihentikan pada Mei 1946. Tim kemudian hijrah ke Yogyakarta bersama Presiden Soekarno, membawa uang yang belum bernomor seri, peralatan, dan kertas sebagai bahan cetak.<sup>57</sup> Adapun kertas yang digunakan bukanlah kertas khusus, melainkan kertas lokal yang dipasok dari Pabrik Kertas Padalarang. Hal ini disebabkan oleh sulitnya memperoleh kertas dengan kualitas tinggi pada masa itu.

Setibanya di Yogyakarta, kertas disimpan tersebar di berbagai lokasi, seperti gudang pabrik gula Demakidjo, rumah Pangeran Purbodirdjo di Patangpuluhan, dan gudang eks percetakan Kolff Buning di Lodji Ketjil. Di pengungsian Yogyakarta, tim pencetak menghadapi tantangan besar karena minimnya alat grafika. Dengan peralatan terbatas, mereka tetap dituntut mencetak uang yang sulit dipalsukan. Sementara di wilayah yang dikuasai NICA, alat dan bahan cetak lebih canggih, sehingga memudahkan pemalsuan uang republik. Merekapun bekerja dengan tenang, selain fasilitas dan bahan baku cukup tersedia, mereka tidak takut tertangkap, sebab NICA tidak menganggap pemalsuan uang Republik sebagai kejahatan. Kekhawatiran pemerintah Republik soal pemalsuan uang di wilayah ini sangat beralasan.<sup>58</sup>

Proses pencetakan dan penerbitan ORI dilanjutkan kembali di wilayah yang masih dikuasai RI karena fasilitasnya yang masih terbatas, tepatnya di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang relatif modern pada waktu itu. Di Yogyakarta, Aos Surjatna dan tim mencetak uang

---

<sup>57</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 128-129.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 129.

kecil dengan mesin boekdruk. Di Solo, Mochtar juga mencetak uang kecil menggunakan mesin percetakan negara. Sementara di Malang, S.E. Oesman dan Utomo mencetak uang besar dengan mesin offset bekas. Apapun hasilnya, menjelang pertengahan 1946, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian persiapan untuk segera mengeluarkan mata uangnya sendiri.<sup>59</sup>

Produksi ORI dilakukan oleh R. A. S. Winarno dan Joener Ramli setiap hari dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB. Pemerintah mengimbau kepolisian di Jawa dan Madura untuk rutin mengawasi percetakan ORI, sementara uang yang dicetak dikirim secara rahasia ke Kementerian Keuangan di Yogyakarta. Uang tersebut dimasukkan ke dalam besek, lalu dibungkus karung goni agar mudah diangkut. Pengiriman dilakukan melalui kereta api di seluruh Jawa dengan bantuan besar dari Jawatan Kereta Api, polisi, tentara, dan pemuda untuk pengangkutan, pengiriman, dan penjagaan.<sup>60</sup> Sebelum uang diedarkan, muncul masalah terkait jaminannya. Namun, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan bahwa uang tersebut akan menggunakan standar a-metalisme, bukan jaminan emas.

sebab kita tahoe bahwa Sebagian besar emas kini soedah ada di Amerika, sehingga kalua kita toeroet mendasarkan dengan emas, maka kita tentoe akan sangat tergantoeng dengan harga emas, jang soedah ada ditangan orang lain. Kita akan memakai standaard ametalisme, jaitoe beroepa barang2 lain jang berharga, jang boekan emas.<sup>61</sup>

Bank Negara Indonesia (BNI) secara resmi dibuka pada 17 Agustus 1946, bertepatan dengan hari peringatan setahun berdirinya Republik Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*. 1991. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), hlm. 76

<sup>60</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 4.

<sup>61</sup> Standar a-metalisme. *Merdeka*, 19 Agustus 1946.

<sup>62</sup> Bank Negara diboeka: f10.000.000 Oeang Republik Dikeloearkan. *Merdeka*, 19 Agustus 1946

Meskipun telah ada beberapa bank asing dan kolonial yang beroperasi, yang paling penting saat itu adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan langkah-langkah pengamanan moneter sebelum mengedarkan ORI. Salah satu langkah tersebut adalah menarik uang Hindia-Belanda dan uang Jepang dari peredaran di wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan RI, meskipun kebijakan ini menimbulkan sedikit kerugian bagi masyarakat, seperti penurunan nilai uang lama, batasan penukaran yang ketat, gangguan perdagangan dan transaksi, dan kenaikan harga barang.<sup>63</sup>

Pemerintah tidak dapat menarik uang dari peredaran secara mendadak karena berisiko merugikan masyarakat dan mengacaukan perekonomian, sehingga penarikan dilakukan secara bertahap, seperti pengumuman berlakunya ORI, penukaran uang lama ke ORI, distribusi ORI dalam transaksi pemerintah, penerapan ORI di pasar dan pencabutan resmi nilai hukum uang lama. Masuknya NICA menyebabkan Indonesia terbagi menjadi wilayah pendudukan dan wilayah RI, sehingga pemerintah membatasi peredaran uang dari luar ke daerah yang masih dikuasainya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.<sup>64</sup>

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1946 menetapkan tentang Pengeloearan Oeang Republik Indonesia. Sejak saat itulah kita mengenal istilah ORI sebagai singkatan dari Oeang Republik Indonesia. Undang-undang menetapkan: Pasal 1 tentang penerbitan ORI oleh pemerintah; Pasal 2

---

<sup>63</sup> Raharjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*, Jakarta, LP3ES. 1995, hlm. 50.

<sup>64</sup> Binhadi, *Financial Sector Deregulation Banking Development and Monetary Policy*. 1995. Jakarta: IBI, hlm. 9.

mengenai dasar penukaran ORI dengan uang lama yang akan diatur lebih lanjut; dan Pasal 3 menjelaskan jenis, warna, serta pecahan ORI.<sup>65</sup>

Pemerintah RI menerbitkan UU No. 19 Tahun 1946 yang mengatur dasar nilai ORI, penukaran dengan uang Jepang, pembayaran utang lama, serta pemberlakuan ORI. Pasal 1 menetapkan nilai 10 rupiah ORI setara 5 gram emas murni. Pasal 2 mengatur nilai tukar ORI dengan uang Jepang: 1 rupiah ORI = 50 uang Jepang (Jawa-Madura) dan 100 uang Jepang (luar Jawa-Madura). Pasal 3 mengatur pembayaran utang berdasarkan waktu terjadinya utang, dengan nilai tukar berbeda terhadap ORI. Setelah UU berlaku, semua utang harus dibayar dengan ORI. Pasal 4 menyatakan uang Jepang tidak lagi berlaku sejak ORI diberlakukan, sesuai keputusan Menteri Keuangan.<sup>66</sup>

Penukaran ORI pada awal peredarannya hanya dapat dilakukan melalui BNI, Kantor Pos, Pegadaian, BRI, serta kantor-kantor keuangan daerah. Setiap penduduk mendapat 1 rupiah ORI, ditambah maksimal 5 sen ORI.<sup>67</sup> Bagi pedagang dan pengusaha di Jakarta, adanya undang-undang tentang pengeluaran ORI memberikan kepastian dan stabilitas dalam menjalankan usaha, terutama dalam perdagangan luar negeri, yang sebelumnya sulit dicapai saat masih menggunakan uang Jepang. Oleh karena itu, ORI diharapkan dapat memperlancar perekonomian Indonesia.

Rakyat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sangat menantikan pengeluaran ORI. Diberitakannya pada 26 Oktober 1946 bahwa pemerintah telah menyebarkan

---

<sup>65</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 17 Tahun 1946 Tentang Pengeloearan Oeang Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

<sup>66</sup> Oendang2 tentang pengeloearan uang Republik Indonesia. *Merdeka*, 28 Oktober 1946.

<sup>67</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 136.



pamflet tentang pengeluaran ORI dengan menggunakan pesawat udara di daerah pelosok Jawa.<sup>68</sup> Selain itu, pada tanggal 26 Oktober 1946, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menyatakan dalam pidatonya:

“Pada malam Minggoe, maka didaerah Repoebliek oeang Repoebliek soedah moelai beredar.”<sup>69</sup>

Sementara itu, menurut berita koran dikabarkan bahwa saat itu pihak NICA berniat untuk menarik uang Jepang dari peredaran.

“Sebagai diketahoei, instansi2 Belanda sampai sekarang masih memberi kesempatan oentoek menoekarkan oeang Djepang dengan oeang NICA, Tetapi berhoeboeng dengan tindakan Repoebliek oentoek tidak mengakoei lagi oeang DJepang moelai tgl 30 Oktober, djoga Belanda toeroet mengekor.”<sup>70</sup>

Demikianlah setelah melalui usaha dan kerja keras selama waktu yang cukup lama dengan berbagai hambatan, pada 30 Oktober 1946 pemerintah RI resmi mengedarkan ORI sebagai alat pembayaran sah di wilayah kekuasaan Republik. ORI seri pertama bertanda tahun emisi “Djakarta, 17 Oktober 1945” dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis. Hingga akhir 1949, lima emisi ORI telah diterbitkan.<sup>71</sup>

Emisi pertama, “Djakarta 17 Oktober 1945” ditandatangani oleh Mr. A. A Maramis, dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Emisi kedua, “Djokjakarta 1 Januari 1947” ditandatangani oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam pecahan 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, dan 100 rupiah. Emisi ketiga, “Jogjakarta 26 Juli 1947” ditandatangani oleh Mr. A.

---

<sup>68</sup> Oeang Republik mulai berlakoe tgl.26 Okt: Peredarannja akan ditentoean lagi. *Merdeka*, 30 Oktober 1946.

<sup>69</sup> Oeang repoebliek berlakoe didaerah Repoebliek. *Merdeka*, 28 Oktober 1946.

<sup>70</sup> Belanda djoega menjetop penoekaran Oeang Djepang. *Merdeka*, 29 Oktober 1946.

<sup>71</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 146

A. Maramis dalam pecahan  $\frac{1}{2}$  rupiah, 2  $\frac{1}{2}$  rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, dan 250 rupiah. Emisi keempat, “Djokjakarta 23 Agustus 1948 ditandatangani oleh Drs. Moh. Hatta dalam pecahan 40 rupiah, 75 rupiah, 100 rupiah, dan 400 rupiah. Emisi kelima, “Djokjakarta 17 Agustus 1949” ditandatangani oleh Mr. Loekman Hakim dan merupakan seri baru dalam pecahan 10 sen baru,  $\frac{1}{2}$  rupiah baru, dan 100 rupiah baru.

Dalam pencetakannya, ORI tergolong rendah karena dicetak dalam kondisi darurat dengan perlengkapan dan bahan yang sangat terbatas. Kertas yang digunakan tipis dan kualitas cetakannya sederhana, bahkan minim fitur keamanan. Namun, hal ini tidak mencerminkan kelemahan, melainkan cerminan dari situasi revolusioner yang tengah dihadapi Indonesia saat itu. Pemerintah Republik Indonesia lebih mengutamakan fungsi ORI sebagai alat tukar dan simbol kemerdekaan, daripada sebagai barang berharga secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ORI bukan untuk dinilai berdasarkan materialnya, melainkan atas dasar kepercayaan, pengakuan hukum, dan semangat kedaulatan nasional.

Dalam mendesain uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia) pada masa revolusi kemerdekaan penuh dengan berbagai tekanan, seperti tekanan politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Soerono<sup>72</sup>, pemilihan desain dengan menggunakan foto Soekarno ditampilkan dalam mata uang ORI karena ia merupakan proklamator utama, simbol perjuangan, dan Presiden pertama Republik Indonesia. Wajah kepala negara umumnya menjadi simbol resmi dalam mata uang nasional, sebagaimana lazim di banyak negara. Sementara itu, meskipun Mohammad Hatta berperan

---

<sup>72</sup> Soerono merupakan pelukis pertama Oeang Republik Indonesia (ORI).

penting sebagai Wakil Presiden dan arsitek ekonomi, perannya lebih banyak di balik layar. Ketidakhadiran fotonya lebih disebabkan oleh strategi visual dan politik, bukan karena kontribusinya diabaikan.<sup>73</sup>

Pada ORI emisi kelima atau yang dikenal dengan ORI seri baru ini digunakan untuk membedakan seri ini dari seri-seri sebelumnya untuk menandai bahwa uang tersebut merupakan edisi terbaru dan berbeda dari ORI-ORI yang sudah beredar luas di masyarakat. ORI ini diedarkan sebagai mata uang Republik satu-satunya untuk seluruh pulau Sumatera mulai 1 November 1949.<sup>74</sup> Penandaan “baru” membantu masyarakat dan otoritas keuangan membedakan mana uang yang masih berlaku resmi dan mana yang sudah tidak berlaku atau akan ditarik dari peredaran.

Pemerintah hanya mampu mencetak uang dalam bentuk kertas untuk memenuhi kebutuhan cepat akan alat tukar yang sah, karena pada saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan berada dalam situasi krisis politik dan ekonomi. Perbedaan penulisan "Djokjakarta" dan "Jogjakarta" disebabkan oleh perubahan ejaan resmi di Indonesia. "Djokjakarta" mengikuti ejaan Van Ophuijsen, sedangkan "Jogjakarta" mengikuti ejaan Soewandi yang diperkenalkan pada 1947. Namun, implementasi ejaan Soewandi tidak langsung merata, sehingga banyak institusi, termasuk percetakan uang, masih menggunakan ejaan lama hingga awal 1950-an.<sup>75</sup> Dalam desain bagian belakang di setiap emisi ORI juga terdapat ketentuan undang-undang yang berisi:

---

<sup>73</sup> Afrizal. Kajian Estetik Desain Mata Uang Rupiah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945-1949. 2013. *Corak: Jurnal Seni Kriya*, Vol. 2, No. 2, hlm. 160-161.

<sup>74</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 164.

<sup>75</sup> Muchsin, dkk. *Islam Dalam Goresan Pena Budaya*. 2019. Yogyakarta: DIVA Press, hlm. 184-190.

“Barang siapa jang meniru atau memalsu uang kertas Negara, atau dengan sengadja mengedarkan, menjimpan ataupun memasukkan ke daerah Republik Indonesia uang kertas tiruan atau palsu, dapat dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 244, 245, dan 249.”<sup>76</sup>

Pemberlakuan ORI ditandai dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946.

Dalam pidatonya antara lain mengatakan sebagai berikut:

Besok tanggal 30 Oktober 1946 satoe hari jang mengandoeng sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoebliek Indonesia sebagai satoe-satoenja alat pembayaran jang sah. Moelai poekoel 12 tengah malam nanti, oeang Djepang jang selama ini beredar sebagai oeang jang sah, tidak lakoe lagi. Beserta dengan uang Djepang itoe ikoet poela tidak lakoe oeang Javasche bank. Dengan ini toetoeplah soeatoe masa dalam sedjarah keoeangan Repoebliek Indonesia. Masa jang penoeh dengan penderitaan dan kesoekaran bagi rakjat kita!<sup>77</sup>

Keluarnya ORI pada Oktober 1946 cukup menggetarkan masyarakat Jakarta. ORI dalam bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia disebut “uang putih” untuk membedakan dengan uang NICA yang disebut “uang merah”.<sup>78</sup> Enam hari setelah ORI (Oeang Republik Indonesia) diterbitkan, beberapa warga Jakarta menunjukkan dukungan dengan lebih memilih ORI dibandingkan uang NICA, seperti seorang tukang becak yang lebih memilih 20 sen ORI daripada 1 rupiah NICA. Di pasar Tanah Abang, harga barang seperti ayam jauh lebih murah jika dibayar dengan ORI. Namun, tidak semua pihak menerima ORI, ada warga yang ditertawakan saat mencoba membeli sarden dengan ORI, dan meski beredar kabar beras bisa dibeli

---

<sup>76</sup> Foto Oeang Republik Indonesia, lihat di lampiran.

<sup>77</sup> Keloearannja oeang Republik hari bersedjarah. *Merdeka*, 31 Oktober 1946.

<sup>78</sup> Erwin Kusuma, *loc.cit.*

dengan ORI, nyatanya barangnya tidak tersedia. Di daerah seperti Banten dan Bogor, masyarakat masih menggunakan uang Jepang dan menolak ORI.<sup>79</sup>

Pada awal kemunculannya, ORI memiliki nilai tukar yang cukup tinggi, dan masyarakat masih mempercayainya sebagai alat pembayaran resmi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Setelah ORI mulai diedarkan, harga-harga barang mulai naik, terutama karena barang-barang impor langka di pasaran. Kelangkaan ini terjadi karena Belanda melakukan blokade ekonomi, sehingga barang dari luar negeri tidak bisa masuk ke wilayah Republik Indonesia. Keadaan semakin memburuk pada tahun 1947, ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pertama. Akibat serangan ini, wilayah Republik semakin sempit dan kegiatan ekonomi terganggu dan menyebabkan inflasi.

Hal ini dapat dilihat pada kurs yang ditetapkan para tengkulak uang di Pasar Glodok, Pancoran, Jakarta.<sup>80</sup> Jika pada 27 Januari 1947 kurs ORI terhadap uang NICA kurang dari 1:30, pada 31 Januari melorot menjadi 1:70 dan terus melorot pada 5 Februari menjadi 1:70 dan terus melorot pada 5 Februari menjadi 1 berbanding 80-85.<sup>81</sup> Disamping itu beredar pula ORI palsu yang disebarkan oleh NICA untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap mata uang Republik Indonesia. Melalui surat kabar diberitakan sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>80</sup> Tengkulak uang merupakan pihak yang melakukan praktik perantara atau pengepul dalam bidang keuangan secara informal, khususnya di lingkungan pasar tradisional. Tengkulak uang berarti mereka membeli, menjual, atau menukarkan uang (biasanya uang lama dengan uang baru atau sebaliknya) dengan mengambil keuntungan pribadi.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 147.

“Sekarang telah ada kabar tentang hal memalsoeverkan oeang repoeblik. Dalam keterangan jang resmi dari Departemen Keoeangan telah diperingatkan tentang memalsoeverkan oeang-oeang kertas dari 5 dan 10 sen, dan oeang kertas dari 10 roepiah...”.<sup>82</sup>

Pada masa awal kemerdekaan, peredaran uang palsu ORI menjadi masalah serius, terutama di wilayah Jawa seperti Banten, Jakarta, dan Yogyakarta. Pemalsuan marak terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri uang asli dan kualitas teknis ORI yang masih sederhana, sehingga mudah ditiru. Akibatnya, kepercayaan terhadap ORI menurun dan aktivitas perdagangan terganggu. Untuk mengatasi masalah peredaran uang palsu yang mengganggu perekonomian negara. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1948, yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, mengatur tentang Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank-bank Berhubung Dengan Adanya uang Palsu. PP ini mengharuskan peredaran uang dalam jumlah tertentu (berpuluh-puluh ribu atau lebih) harus dilakukan melalui perantaraan bank.<sup>83</sup>

Pada periode 1945–1949, Indonesia menghadapi situasi dualisme mata uang yakni Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh pemerintah RI, dan uang NICA yang dibawa masuk oleh Belanda melalui sekutu. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berupaya menghadapi tantangan dalam menegakkan kedaulatan moneter dan menjadikan ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dengan cara menetapkan ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang

---

<sup>82</sup> Oeang Repoeblik dipalsoever. *Pelita Rakjat*, 8 Nopember 1946.

<sup>83</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia. *PP No. 14 Tahun 1948 Tentang Perantaraan Bank-Bank Pemerintah Dalam Peredaran Uang Berhubung Dengan Adanja Uang Palsu*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

sah melalui UU No. 17 Tahun 1946, melakukan penukaran dan penarikan uang lama melalui kantor pos, mengupayakan kerja sama internasional agar mendapatkan pengakuan dimata internasional.

Dalam masa revolusi, sulit bagi pemerintahan baru Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter yang stabil dan terarah. Namun, bagi rakyat, ORI bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki uang dengan gambar pemimpin bangsa sendiri, Presiden Soekarno, yang menjadi simbol pemersatu bangsa.

### **3.2 Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA)**

Pada tahun 1947, situasi di perbatasan wilayah Republik Indonesia dan Belanda memanas, dengan sering terjadinya pertempuran antara pejuang pro-Republik dan tentara Belanda. Kondisi memburuk setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I, yang membuat posisi Republik melemah dan sejumlah wilayahnya direbut. Keadaan ini diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville pada Januari 1948, yang semakin membatasi wilayah kekuasaan Republik. Sjafruddin Prawiranegara, orang yang mengusulkan agar pemerintah RI mengeluarkan ORI, telah menduga bahwa peredaran ORI tak akan berjalan mudah dan bukan menjadi akhir dari perjuangan.<sup>84</sup>

Faktanya, ORI memang hanya berlaku di Jawa dan Madura. Setelah ORI resmi beredar pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mendistribusikannya secara hati-hati ke wilayah Jawa dan Madura, dengan

---

<sup>84</sup> Ajip Rosidi, *Sjadruddin Prawiranegara: Lebih Takut Kepada Allah SWT*. 2018. Bandung: Pustaka jaya, hlm. 134.

pengawasan ketat untuk menghindari gangguan tentara NICA. Dalam masa perang melawan tentara Belanda, komunikasi antara pusat dan daerah terputus, sehingga pencetakan uang ORI secara terpusat oleh BNI tidak dapat dilakukan. Para pemimpin republik seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir tetap berupaya mengunjungi wilayah-wilayah republik meskipun dalam kondisi sulit. Ketika ORI sulit beredar di Jawa Barat dan Sumatera, tokoh-tokoh pro republik di daerah tersebut mengusulkan izin mencetak uang sendiri.

Sambil menunggu persetujuan pusat, pemerintah Sumatera mengambil inisiatif mencetak uang sendiri bernama ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera). Penerbitan ini berlandaskan Maklumat Gubernur Sumatera Timur Tengku Mohammad Hasan no. 92/K.O. tertanggal 8 April 1947, dengan emisi tertanggal 11 April 1947.<sup>85</sup> ORIPS menjadi ORIDA pertama di Indonesia dengan pecahan 1, 5, 10, dan 100 rupiah. Pemerintah pusat mendukung penerbitan ORIPS yang nilainya setara dengan 1 ORI di Jawa sedangkan dengan uang jepang nilainya 1:100, namun peredarannya terhambat oleh blokade tentara NICA. Setelah Agresi Militer Belanda pertama menyerang Pematang Siantar, pencetakan ORIPS dipindahkan ke Bukittinggi, yang kemudian menjadi pusat penerbitan ORIPS untuk wilayah Sumatera.<sup>86</sup>

Pemerintah pusat merespons penerbitan uang daerah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1947 pada 26 Oktober 1947 yang mengizinkan

---

<sup>85</sup> Utami, S, *Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Pematang Siantar dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Pada Tahun 1947-1949*. 2020. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Medan, hlm. 27-28.

<sup>86</sup> Kementrian Keuangan, Edisi Khusus Jelajah Sejarah Rupiah. *Media Keuangan*. 2020. Volume 15, No. 157, hlm. 29.



pemerintah daerah di tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten untuk menerbitkan ORIDA nya masing-masing. ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut.<sup>87</sup> Hak otonomi untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah) disambut antusias oleh masyarakat. Di Sumatera Timur, kebijakan ini memicu ledakan penerbitan berbagai jenis alat pembayaran selama masa revolusi fisik. Banyak kabupaten di wilayah tersebut menerbitkan ORIDA untuk memenuhi kebutuhan transaksi perdagangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, terdapat beberapa bentuk ORIDA yang beredar di Sumatera Timur, seperti uang, bon, kupon, mandat, dan tanda pembayaran.

Penerbitan ORIDA dilakukan selain karena sulitnya peredaran ORI, juga untuk membiayai kegiatan pemerintah lokal. Tidak semua wilayah di luar Jawa dan Madura mencetak ORIDA karena masih berada di bawah kekuasaan Belanda, seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di wilayah-wilayah tersebut, mata uang yang beredar adalah uang NICA, uang Belanda, atau sisa uang Jepang. Hanya sebagian kecil daerah di Kalimantan yang dikuasai Republik mampu menerbitkan uang lokal, sementara wilayah lainnya tetap menggunakan mata uang kolonial.

Pada Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, kota Pematang Siantar diserbu dan mesin pencetak ORIPS jatuh ke tangan Belanda, menghentikan produksinya. Belanda lalu menggunakan mesin tersebut untuk memalsukan ORIPS guna mengacaukan ekonomi rakyat, dengan uang palsu menyebar hingga Tapanuli,

---

<sup>87</sup> Darsono, dkk. *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*. 2017. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 248.

Aceh, dan Sumatera Barat. Situasi diperparah oleh keterlibatan komplotan pemalsu uang dari Singapura. Saat situasi memburuk, pemerintah melakukan pembersihan dan menginformasikan masyarakat tentang uang palsu. Pada Maret 1948, ORIDA ditarik dari peredaran untuk diperiksa, dan uang yang terbukti asli diedarkan kembali setelah diberi cap merah.

Peredaran berbagai mata uang dengan nilai tukar berbeda dalam satu wilayah menimbulkan kekacauan moneter. Baik di wilayah Republik Indonesia maupun NICA, inflasi terjadi akibat meningkatnya jumlah uang. Di wilayah RI, pencetakan ORI yang terus meningkat untuk membiayai perang menyebabkan lonjakan volume uang beredar hingga tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada akhir tahun 1949, di daerah yang dikuasai Republik Indonesia, volume uang beredar telah mencapai jumlah Rp6 miliar, sedangkan di daerah pendudukan Belanda jumlahnya adalah Rp3,7 miliar.<sup>88</sup>

Lonjakan peredaran uang pada tahun 1949 menunjukkan peningkatan tajam di wilayah Republik Indonesia dan NICA jika dibandingkan dengan volume uang beredar sebelum Perang Dunia II, yang tercatat sebesar 420 juta gulden pada Maret 1938.<sup>89</sup> Akibatnya, ekonomi Indonesia mengalami kekacauan parah dan dilanda hiperinflasi. Kesepakatan Indonesia dan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949 mengakhiri ORI dan ORIDA. Uang-uang itu harus ditarik setelah Indonesia dan Belanda sepakat mengeluarkan uang baru melalui De Javasche Bank, bank sentral Hindia Belanda.

---

<sup>88</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 172.

<sup>89</sup> *Ibid.*

### 3.3 Oeang Republik Indonesia Serikat (ORIS) dan Gunting Syafruddin

Usaha Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia melalui perang akhirnya gagal dan mendapat kecaman internasional. Untuk mengakhiri konflik, Indonesia dan Belanda sepakat mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus–2 November 1949. Hasilnya, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), mengakhiri dualisme kekuasaan dan masa pemerintahan NICA di Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara boneka buatan Belanda.<sup>90</sup> Pembentukan RIS turut memengaruhi sistem keuangan, termasuk mata uang. Sesuai kesepakatan KMB, De Javasche Bank (DJB) ditetapkan sebagai bank sentral RIS dan menerbitkan Oeang Republik Indonesia Serikat (ORIS) sebagai alat pembayaran resmi.

Pada 1 Januari 1950, diterbitkan Oeang Republik Indonesia Serikat (ORIS) atau "uang federal" dalam pecahan Rp5 dan Rp10, bertanggal "Djakarta 1 Djanuari 1950" dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Uang ini diterbitkan oleh perusahaan asing Thomas De La Rue & Company Limited, London dan menampilkan gambar Soekarno, sehingga dikenal sebagai "emisi Bung Karno". Pada hari yang sama, pemerintah kebijakan unifikasi atau penyatuan sistem mata uang mulai dilakukan dengan menjadikan ORIS sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah RIS, sebagai langkah

---

<sup>90</sup> Wahjudi Djaja, *RIS: Republik Indonesia Serikat*. 2018. Klaten: Cempaka Putih, hlm. 17.

awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, menggantikan ORI dan ORIDA yang ditarik dari peredaran mulai 1 Mei 1950.<sup>91</sup>

Dalam rangka penerbitan ORIS, pada Maret 1950, Kementerian Keuangan RIS menetapkan beberapa prosedur penukaran ORI dengan ORIS, antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga yang bertanggung jawab dalam penukaran ORI dengan ORIS adalah Kementerian Keuangan bagian ORI, kantor-kantor penukaran, Komisi Pemusnahan ORI, dan Komisi Uang Palsu yang dibentuk pada tiap-tiap kantor penukaran.
2. Komisi Pemusnahan ORI bertugas menerima dan menghitung kembali ORI yang diterima, lalu memusnahkannya lewat proses pembakaran.
3. Sebagai kantor penukaran, ditunjuk kantor-kantor yang berada di wilayah Perjanjian Renville dari Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Kantor Pos, dan Djawatan Pegadaian Negara.
4. Penukaran uang ORI dengan ORIS dimulai pada 27 Maret hingga 30 April 1950 dengan jumlah tidak lebih dari Rp5000.
5. Kepada kantor penukaran dan Komisi Uang Palsu akan dikirimkan ciri-ciri dari uang palsu yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan.<sup>92</sup>

Selama masa pemerintahan RIS yang singkat, pemerintah juga menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Gunting Sjafruddin. Kebijakan ini muncul dengan tujuan menekan inflasi dan mendorong ekspor dan sebagai respons terhadap berbagai masalah ekonomi yang menghambat jalannya pemerintahan. Saat itu, jumlah uang beredar mulai terhitung sangat berlebihan, mencapai sekitar Rp3,9 miliar, jauh melebihi batas ideal yang diperkirakan hanya Rp2,5 miliar, atau enam kali lipat dari posisi tahun 1938 yang dianggap seimbang, yaitu Rp420 juta.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Kementerian Keuangan, *op.cit*, hlm. 37.

<sup>92</sup> Erwin Kusuma, *op.cit*, hlm. 173-174.

<sup>93</sup> Erwin, Kusuma dkk, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. 2014. Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, hlm.96.

Pemerintah bertekad mengurangi jumlah uang beredar hingga setengahnya karena belum memiliki sumber pembiayaan yang stabil. Sebagai langkah awal, pada 11 Maret 1950 diterapkan sistem Sertifikat Devisa untuk memperbaiki neraca pembayaran, mendorong ekspor, dan membatasi impor, dengan harapan menguntungkan petani kecil. Selanjutnya, pada 18 Maret 1950, pemerintah menetapkan kebijakan pembersihan moneter yang dikenal sebagai kebijakan Gunting Syafruddin melalui SK MENKEU RIS No. PU/1 pada pasal 5, sebagai Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil keputusan untuk memotong 2 uang NICA dan uang De Javasche Bank dengan gunting dari pecahan Rp 5 keatas. Tetapi, uang ORI tidak digunting karena uang tersebut merupakan simbol kedaulatan dan legitimasi Republik Indonesia, serta memiliki jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan uang NICA dan uang De Javasche Bank yang beredar secara luas.<sup>94</sup>

Pengguntingan uang kertas dimulai pada 19 Maret 1950. Bagian kanan uang yang digunting bisa ditukar dengan Obligasi Republik Indonesia 1950 (Obligasi Pinjaman Darurat) dengan bunga 3% per tahun. Bagian kiri dari uang pecahan di atas f2,50 tetap diakui sebagai alat pembayaran sah, namun nilainya hanya separuh dari nominal. Bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan oleh De Javasche Bank dengan pecahan 2,5 rupiah, 1 rupiah, dan 0,5 rupiah. Penukaran itu dibatasi hingga 16 April 1950 dan setelah itu tidak berlaku lagi.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Wahjudi Djaja, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>95</sup> Erwin Kusuma, dkk, *Uang Indonesia, op.cit*, hlm. 176-177.

Meskipun bertujuan menstabilkan ekonomi, kebijakan Gunting Sjafruddin menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, komunikasi dan transportasi membuat informasi tentang kebijakan tersebut tidak sampai ke wilayah-wilayah tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menipu warga desa dengan menukarkan uang pecahan besar secara curang. Selain itu, pedagang kelontong di kota juga mengalami kerugian karena kurang memahami dampak kebijakan tersebut.

Secara *de facto*, RIS sudah berakhir sejak April 1950, karena pada saat itu hanya Republik Indonesia (RI) yang masih ada dalam RIS. Negara-negara bagian lainnya telah bergabung dengan RI, sehingga pada Maret 1950, RIS hanya terdiri dari RI, Negara Kalimantan Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Menyadari hal ini, pada 15 Agustus 1950, DPR dan senat RIS mengadakan rapat untuk memutuskan bahwa RIS harus dibubarkan dan menandatangani piagam yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua hari kemudian, pada 17 Agustus 1950, tepat lima tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.<sup>96</sup>

Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan sistem ekonomi pada masa liberal seperti: (1) gerakan benteng berupa program bantuan modal dan pelatihan kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing, (2) Kebijakan kolaborasi antara pengusaha pribumi (“Ali”) dan pengusaha Tionghoa (“Baba”) untuk membina ekonomi nasional, (3) Finansial

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

Ekonomi (Finek) untuk merundingkan ulang hubungan ekonomi Indonesia-Belanda secara bilateral dan nasional, (4) rencana pembangunan lima tahun sebagai upaya merancang pembangunan ekonomi jangka panjang, (5) Reformasi agraria, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Pemerintah berharap hasil pertanian bukan hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga bisa diekspor untuk meningkatkan pendapatan negara.

### 3.4 Rupiah Seri Pahlawan dan Kebudayaan

Pada awal 1950-an, ketika pemerintah Republik Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer, Indonesia belum memiliki undang-undang mata uang sendiri. Pada 27 September 1951, Menteri Keuangan Jusuf Wibisono menetapkan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntweet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang.<sup>97</sup> Undang-Undang darurat tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 27 Tahun 1953 dan sejak itu terus digunakan sebagai undang-undang mata uang RI.<sup>98</sup>

Undang-Undang Mata Uang 1951 menetapkan Rupiah sebagai satuan uang Indonesia dengan singkatan "Rp". Nama "Rupiah" ini diusulkan oleh Ir. Surachman Tjokroadisudirjo selaku Menteri Keuangan Pertama Republik Indonesia. Rupiah sudah dikenal masyarakat sejak masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, ketika digunakan sebagai nama mata uang Hindia Belanda.<sup>99</sup> Sebelum kemerdekaan, rupiah dan gulden digunakan bersamaan sebagai sebutan mata uang

---

<sup>97</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Darurat no. 20 Tahun 1951 pasal 4 ayat 1*. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 13 Oktober 2025.

<sup>98</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia, *UU no. 27 Tahun 1953*. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 13 Oktober 2025.

<sup>99</sup> Irwan Kusdinar. *Pengetahuan Tentang Mata Uang*. 2018. Bandung. PT Sarana Pancakarya Nusa, hlm. 4.

Hindia Belanda, dengan simbol "*f*" yang berarti florijn atau florin, mata uang yang berasal dari kota Florence. Di Indonesia, Nama "Rupiah" berasal dari kata Sanskerta "Rupēe" yang berarti perak dan memiliki kemiripan dengan nama mata uang India.<sup>100</sup>

Nama-nama mata uang di berbagai negara umumnya berasal dari kata yang berarti emas atau perak, karena kedua logam mulia ini sejak lama digunakan sebagai alat tukar yang bernilai dan langka. Misalnya, "guilders" di Belanda dan Jerman berasal dari kata *geld* (emas), "argent" di Prancis berarti perak, "siller" di Skotlandia juga berarti perak, dan "dollar" berasal dari kata Jerman *thaler*, yang merupakan koin perak dari Joachimsthal, Bohemia. Hal ini menunjukkan pentingnya logam mulia dalam sejarah uang.

Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menerbitkan uang kertas Seri Pemandangan Alam I, yang dicetak oleh Security Banknote Company dan ditandatangani oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Uang kertas ini dirancang sebagai pengganti Oeang Republik Indonesia (ORI) yang sebelumnya digunakan. Bank Indonesia yang baru disahkan sebagai bank sentral, telah menyiapkan uang kertas sejak nasionalisasi De Javasche Bank pada akhir 1951. Namun, uang tersebut baru resmi diedarkan pada 2 Juli 1953, setelah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia disahkan dan berlaku sejak 1 Juli 1953.

Uang kertas pertama Bank Indonesia bertahun 1952 diterbitkan dalam tujuh pecahan: Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, dan Rp1000. Desain Rp5 menampilkan R.A. Kartini, sedangkan Rp100 bergambar Pangeran Diponegoro.

---

<sup>100</sup> Erwin Kusuma, *Uang Indonesia, op.cit*, hlm. 180.



Pecahan lainnya menampilkan unsur budaya seperti patung, relief, dan ornamen. Pencetakan dilakukan di luar negeri oleh Thomas De La Rue di Inggris untuk Rp5 dan Joh. Enschede en Zonen di Belanda untuk pecahan lainnya, kecuali sebagian Rp10 dan Rp25 yang dicetak oleh NV Pertjetakan Kebajoran di Indonesia.<sup>101</sup>

Desain uang menunjukkan peningkatan kualitas, dengan garis halus dan penggunaan kaca pembesar untuk pengamatan detail. Pengaman berupa benang hanya ada di pecahan Rp500 ke atas, sementara pecahan kecil mengandalkan desain visual dan kertas khusus. Uang tersebut diedarkan secara bertahap antara 2 Juli 1953 hingga 25 Januari 1955, dengan seluruh pecahan ditandatangani oleh Gubernur Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Direktur Mr. Indra Koesoema. Desainnya menampilkan tokoh-tokoh pahlawan serta unsur-unsur budaya Indonesia, seri uang ini dikenal dengan nama Seri Pahlawan dan Kebudayaan.<sup>102</sup>

Gambar pahlawan dan kebudayaan Indonesia adalah bentuk nyata dari perlawanan terhadap simbol-simbol kolonial, mengingat pada saat itu menjadi momentum keberhasilan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Desain rupiah pertama yang menampilkan gambar pahlawan dan kebudayaan Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Gambar pahlawan menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh perjuangan, sementara elemen kebudayaan mencerminkan jati diri bangsa yang beragam namun bersatu.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 185-187.

<sup>102</sup> *Ibid*.

### **3.5 Perkembangan Mata Uang Indonesia dari Oeang Republik Indonesia (ORI) hingga Rupiah Seri Pahlawan dan Kebudayaan**

Dalam perubahan mata uang Indonesia tahun 1945-1953, terjadi berbagai perkembangan yang mencerminkan dinamika politik dan ekonomi. Perkembangan tersebut meliputi satuan hitung, nominal dan nilai tukar (kurs), bahan uang, desain, dan Lembaga pengelola mata uang.

#### **a. Perkembangan Satuan Hitung**

Masyarakat Indonesia menggunakan satuan mata uang gulden sebelum tahun 1945, yang merupakan warisan dari Hindia Belanda. Sejak munculnya ORI tahun 1946, digunakan satuan baru yaitu rupiah dan sen, yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai satuan mata uang Indonesia berdasarkan UU Darurat No. 20 Tahun 1951.

#### **b. Perkembangan Nominal dan Nilai Tukar (Kurs)**

ORI pertama kali diterbitkan dalam pecahan kecil hingga besar yaitu dari 1 sen hingga 100 rupiah. Kurs terhadap uang Jepang ditetapkan 1: 50 di Jawa dan Madura, 1:100 di luar Jawa dan Madura sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1946. Kurs ORI sempat menurun akibat inflasi dan perang, seperti kurs ORI terhadap uang NICA pernah jatuh menjadi 1:80-85. Saat ORIS diberlakukan tahun 1950, kurs penukaran terhadap ORI dibatasi maksimum Rp 5000, menandakan upaya menekan uang beredar berlebih. Pada 1950 juga ditetapkan nilai dasar ORI sebesar 10 rupiah = 5 gram emas murni sebagai patokan terhadap yang asing.

### c. Perkembangan Bahan Uang

ORI dan ORIDA dicetak dengan peralatan seadanya, kertas biasa, bahkan dicetak sembunyi-sembunyi karena ancaman Belanda. Penggunaan bahan berkualitas rendah menyebabkan uang mudah rusak dan dipalsukan, sehingga memperparah inflasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Kualitas bahan mengalami peningkatan, terutama pada ORIS yang dan Rupiah 1953 yang dicetak di luar negeri oleh Thomas De La Rue di Inggris dan Enschede en Zonan di Belanda dengan menggunakan pengamanan seperti benang pengaman dan kertas khusus. Bank Indonesia mulai menerbitkan uang dengan standar lebih tinggi, memperbaiki mutu bahan cetak, dan keawetan fisik uang.

### d. Perkembangan Desain

Desain awal ORI menampilkan tokoh nasional seperti Presiden Soekarno, lambang-lambang nasional seperti keris, gunung berapi, padi, dan lain-lain sebagai simbol keadulatan. Desain berkembang semakin artistik dan politis, memperkuat identitas nasional dan semangat kemerdekaan. Uang kertas tahun 1953 memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti RA. Kartini dan Pangeran Diponegoro, serta pemandangan alam dan kebudayaan Indonesia menjadi cikal bakal “Seri Pahlawan dan Kebudayaan”. Ornament guilloche<sup>103</sup>, cetakan offset, serta penyesuaian warna dominan memperjelas fitur pengaman dan daya tarik visual.

---

<sup>103</sup> Ornamen guilloche adalah pola dekoratif yang terdiri dari garis-garis lengkung yang saling berulang, bersilangan, dan tersusun simetris membentuk motif geometris yang rumit.

e. Perkembangan Lembaga pengelola mata uang

Pemerintah Republik Indonesia awalnya menangani pencetakan dan peredaran uang, kemudian membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral pertama Indonesia. Setelah RIS dibentuk dan DJB kembali beroperasi, DJB ditetapkan sebagai bank sentral RIS dan pencetak ORIS. Pada tahun 1953, setelah nasionalisasi DJB, terbentuklah Bank Indonesia sebagai bank sentral resmi RI, yang kemudian mulai menerbitkan uang rupiah sendiri.

Perubahan mata uang Indonesia pada periode 1945–1953 dapat dianalisis melalui tiga pendekatan teoritis: nasionalisme, kedaulatan, dan ekonomi makro. Penerbitan Uang Republik Indonesia (ORI) pada tahun 1946 merupakan simbol kedaulatan dan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Di tengah ancaman kolonial Belanda dan beredarnya uang NICA, ORI menjadi alat untuk menegaskan identitas nasional serta kepemilikan atas sistem keuangan sendiri. Penolakan terhadap uang NICA melalui Maklumat 2 Oktober 1945 menunjukkan sikap tegas terhadap dominasi asing. Selain itu, munculnya ORI Daerah (ORIDA) saat pusat dan daerah terputus mencerminkan bahwa semangat mempertahankan kedaulatan juga tumbuh dari tingkat lokal. Dengan demikian, ORI bukan hanya alat tukar, tetapi juga simbol perjuangan ideologis dan legitimasi negara.

Peredaran ORI menghadapi tantangan berat berupa inflasi tinggi dan kelangkaan barang. Fenomena seperti ini termasuk dalam ranah teori ekonomi makro karena teori ini membahas variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh yang memengaruhi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dan barang yang tersedia

menyebabkan tekanan inflasi yang terus meningkat. Peredaran berbagai jenis mata uang seperti ORI, ORIDA, dan ORIPS di berbagai wilayah juga menimbulkan fragmentasi ekonomi<sup>104</sup> dan ketidakpastian nilai tukar, yang memperparah kondisi makroekonomi nasional.

---

<sup>104</sup> Fragmentasi ekonomi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau antar wilayah tidak terintegrasi dengan baik. Ini berarti ada ketidakterhubungan atau keterpisahan dalam sistem ekonomi yang menyebabkan ketimpangan, ketidakefisienan, atau hambatan dalam distribusi barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.